

PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG KEWIRAUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM

Hety Gusnia¹

gusniahety@gmail.com¹

Hendra Riofita²

hendrariofita@yahoo.com²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have a strategic role in national economic development, especially in terms of their contribution to Gross Domestic Product (GDP) and employment absorption. This study aims to analyze the role of government policies in supporting entrepreneurship and human resource (HR) development to encourage the growth of MSMEs in Indonesia. The method used is descriptive qualitative through literature study. The results of the study indicate that government policies, such as easy access to financing through People's Business Credit (KUR), entrepreneurship training, provision of business incubators, and MSME digitalization, contribute significantly to strengthening the competitiveness of business actors. On the other hand, human resource development through technical, managerial training, and the use of digital technology are also important aspects in increasing the capacity of MSMEs in a sustainable manner. In conclusion, the synergy between government policies and the readiness of MSME actors is the key to creating inclusive and sustainable economic growth.

Keywords: MSMEs, Government Policy, Entrepreneurship, Human Resources, Economic Growth.

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam hal kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan pemerintah dalam mendukung kewirausahaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) guna mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah, seperti kemudahan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan kewirausahaan, penyediaan inkubator bisnis, serta digitalisasi UMKM, berkontribusi signifikan terhadap penguatan daya saing pelaku usaha. Di sisi lain, pengembangan SDM melalui pelatihan teknis, manajerial, dan pemanfaatan teknologi digital juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan kapasitas UMKM secara berkelanjutan. Kesimpulannya, sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesiapan pelaku UMKM menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: UMKM, Kebijakan Pemerintah, Kewirausahaan, Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

UMKM memiliki peranan penting dalam setiap negara berkembang, begitu juga dengan Indonesia. UMKM mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan Indonesia terutama kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), dan memiliki peran dalam segala bidang contohnya, dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Sehingga selain berfungsi sebagai pertumbuhan ekonomi nasional serta perannya terhadap penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memberikan mamfaat bagi sumber daya nasional, termasuk dalam pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum.

Menurut pendapat Sulistyastuti (2004) bahwa UMKM mampu memberikan manfaat sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang. Kondisi perekonomian di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negaranegara tetangga. Bahkan sekarang ini Indonesia masih disebut negara berkembang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia dan tingkat kemakmuran rakyat yang masih kurang. Untuk mengatasi hal tersebut maka Indonesia membutuhkan orang-orang yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Pencipta lapangan pekerjaan ini biasanya dengancara membuka usaha industri. Industri yang dibuat tidak harus dalam skala besar, tapi bisa dengan skala kecil maupun

menengah. Sekarang ini Usaha Kecil dan Menengah biasanya lebih diminati karena tidak memerlukan modal yang besar dan belum banyak pesaingnya. Selain itu didalam menjalankan usahanya, Usaha Kecil dan Menengah lebih mudah dan sederhana. Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu penopang perekonomian bangsa dan juga menjadi salah satu sumber penghasilan Negara melalui pajak yang dibayar, tidak hanya untuk Negara, Usaha Kecil dan Menengah juga berperan untuk mengurangi pengangguran, selain itu juga untuk meningkatkan penghasilan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat bertambah.

LITERATURE REVIEW

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga negara untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lingkungan. Kebijakan ini dibuat untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting demi kepentingan umum, seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga ketertiban umum, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam proses pembuatannya, kebijakan pemerintah biasanya didasarkan pada kajian ilmiah, data, masukan dari masyarakat, serta pertimbangan politis dan hukum. Kebijakan dapat berbentuk peraturan, program, atau tindakan langsung yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Contohnya adalah kebijakan subsidi bahan bakar, program

bantuan sosial, kebijakan wajib belajar 12 tahun, dan aturan pembatasan penggunaan plastik. Kebijakan ini tidak hanya dibuat oleh eksekutif seperti presiden atau menteri, tetapi juga bisa melibatkan legislatif seperti DPR, serta pelaksanaannya diawasi oleh lembaga yudikatif. Tujuan utama dari kebijakan pemerintah adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan adil. Oleh karena itu, kebijakan yang baik seharusnya memperhatikan aspirasi rakyat, bersifat transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi, maka bisa menimbulkan ketidakpuasan masyarakat atau bahkan konflik. Maka dari itu, peran serta masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan efektif

Kewirausahaan

Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha, dan diberi imbuhan ke--an. Wira dapat diartikan sebagai ksatria, pahlawan, pejuang atau gagah berani. Sedangkan usaha adalah bekerja atau melakukan sesuatu. Jadi, pengertian kewirausahaan (Entrepreneurship) adalah perilaku dinamis yang berani mengambil risiko serta kreatif dan berkembang. Sedangkan, pengertian wirausaha (entrepreneur) adalah seseorang yang tangguh melakukan sesuatu, dari pengertian diatas pasti anak muda sekarang mau untuk berwirausaha karena dalam jiwa muda mempunyai rasa semangat untuk menjadi seorang pahlawan untuk mengembangkan dan mensejahterakan orang banyak. Kewirausahaan adalah hasil latihan dan praktek.

Pengembangan Sumber Daya Alam

Pengembangan sumber daya alam adalah upaya yang dilakukan untuk

memanfaatkan kekayaan alam secara optimal, berkelanjutan, dan bertanggung jawab demi memenuhi kebutuhan manusia serta mendukung pembangunan suatu negara. Sumber daya alam mencakup segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti air, tanah, hutan, tambang, dan hasil laut. Pengembangan sumber daya alam bukan hanya tentang mengambil atau mengeksploitasi kekayaan alam, tetapi juga mencakup pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan dengan cara yang ramah lingkungan. Dalam praktiknya, pengembangan sumber daya alam dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembangunan infrastruktur, penerapan teknologi ramah lingkungan, pelatihan sumber daya manusia, serta perencanaan yang matang agar pemanfaatan tidak merusak ekosistem. Pemerintah, swasta, dan masyarakat memiliki peran penting dalam proses ini. Misalnya, di sektor pertanian, pengembangan dilakukan melalui penggunaan pupuk organik, irigasi modern, dan pemilihan bibit unggul. Di sektor energi, pemerintah mendorong pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin sebagai alternatif pengganti energi fosil. Tujuan utama dari pengembangan sumber daya alam adalah agar kekayaan alam dapat dimanfaatkan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat dan tetap tersedia untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

Pertumbuhan UMKM

Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merujuk pada proses peningkatan kapasitas dan kemampuan usaha-usaha yang berada dalam kategori mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang, baik dari segi omzet, skala produksi, manajerial, maupun jaringan

pemasaran. UMKM memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, karena mereka menjadi motor penggerak lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Pertumbuhan UMKM dapat dilihat melalui peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi produk, ekspansi pasar, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas produk.

Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, UMKM perlu didukung oleh berbagai kebijakan dan fasilitas, seperti akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, serta kemudahan dalam perizinan dan regulasi. Pemerintah juga memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti melalui program kredit usaha rakyat (KUR), pembinaan kapasitas manajerial, serta pemberian insentif untuk pengembangan produk dan pasar. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh UMKM, seperti keterbatasan akses pasar, rendahnya kemampuan teknologi, dan kesulitan dalam hal pendanaan, memerlukan perhatian serius agar pertumbuhannya dapat lebih optimal. Dengan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, UMKM dapat menjadi kontributor signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang akan memberikan gambaran beberapa kemungkinan jawaban untuk memecahkan masalah aktual (up to date) dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Kutha (2010:30) menjelaskan, metode deskriptif analisis

dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusun dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi pustaka (library research) dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis jurnal-jurnal, buku, artikel dari peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan obyek penelitian serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian seperti foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2016:291), berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Data diperoleh dari data yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Oleh karena itu, pengembangan dan keberlanjutan UMKM memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, maupun

pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah memegang peranan penting dalam mendukung kewirausahaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) guna menciptakan UMKM yang mampu berdaya saing dan bertumbuh secara berkelanjutan.

Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Kewirausahaan

Salah satu aspek utama yang mendukung pertumbuhan UMKM adalah kebijakan yang berfokus pada pengembangan kewirausahaan. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk mendukung pelaku usaha, mulai dari UMKM baru hingga yang sudah berkembang. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kewirausahaan, termasuk penyediaan akses pendanaan, pelatihan, serta pemasaran produk.

1. Akses Pembiayaan

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses pembiayaan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia dan Lembaga Pembiayaan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) menyediakan fasilitas pembiayaan dengan bunga rendah bagi pelaku UMKM. Melalui kebijakan ini, pelaku UMKM dapat memperoleh modal dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan dengan kredit yang ditawarkan oleh bank komersial. Selain itu, pemerintah juga menggandeng berbagai lembaga keuangan non-bank untuk memberikan pembiayaan dengan skema yang lebih fleksibel.

2. Pelatihan dan Inkubasi Bisnis

Pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber

daya manusia (SDM) melalui berbagai pelatihan kewirausahaan. Program pelatihan ini mencakup pengembangan keterampilan dalam hal manajemen bisnis, pemasaran, dan penggunaan teknologi informasi. Inkubator bisnis yang didirikan oleh pemerintah atau lembaga swasta juga berfungsi sebagai tempat bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan bimbingan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis mereka, baik dari segi operasional maupun pemasaran.

3. Pemasaran dan Akses Pasar

Pemerintah Indonesia melalui program e-commerce dan digitalisasi UMKM berusaha untuk membantu para pelaku UMKM dalam memperluas pasar. Misalnya, pemerintah memberikan akses pelatihan mengenai platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, yang memungkinkan pelaku UMKM untuk menjual produk mereka secara online. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi UMKM dalam mengikuti pameran-pameran internasional yang dapat membuka peluang ekspor.

Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm)

SDM yang berkualitas merupakan faktor penentu utama dalam keberhasilan suatu usaha. Oleh karena itu, pengembangan SDM UMKM menjadi salah satu fokus utama kebijakan pemerintah. Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM UMKM antara lain sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah menyediakan berbagai program pelatihan teknis dan manajerial bagi pelaku UMKM, baik melalui lembaga

pendidikan formal maupun non-formal. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan para pengusaha dalam mengelola usahanya, seperti kemampuan dalam perencanaan keuangan, manajemen produksi, dan pengembangan produk. Salah satu contoh program pemerintah adalah program pendidikan kewirausahaan yang diadakan oleh perguruan tinggi dan lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

2. Pemberdayaan Melalui Teknologi

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kini menjadi bagian integral dalam perkembangan bisnis, termasuk UMKM. Pemerintah melalui berbagai program seperti Gerakan Nasional 100 Smart City dan berbagai inisiatif digitalisasi UMKM berusaha untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi. Program pelatihan mengenai penggunaan platform digital, media sosial untuk pemasaran, serta e-commerce menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan pasar.

3. Penguatan Kemampuan Manajerial

Banyak UMKM di Indonesia yang terkendala oleh rendahnya kemampuan manajerial. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui berbagai lembaga memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan kemampuan manajerial, seperti perencanaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, serta strategi pemasaran yang efektif. Hal ini penting agar UMKM dapat berkembang dengan mengelola bisnis mereka secara profesional.

DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Dalam jangka pendek, kebijakan yang fokus pada akses pembiayaan dan pelatihan dapat membantu pelaku UMKM untuk tetap bertahan di tengah tantangan ekonomi. Dalam jangka panjang, kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan SDM dan digitalisasi dapat meningkatkan daya saing UMKM, tidak hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar internasional. Selain itu, program-program pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat UMKM juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja. Sebagai contoh, keberhasilan UMKM dalam mengembangkan usaha mereka dapat membuka peluang pekerjaan baru, baik dalam sektor produksi, distribusi, maupun pemasaran. Dengan demikian, pertumbuhan UMKM dapat berdampak langsung pada pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM tidak dapat dipisahkan dari peran aktif pemerintah dalam menyusun dan menerapkan kebijakan yang berpihak pada penguatan kapasitas usaha dan pengembangan sumber daya manusianya.

Kebijakan pemerintah yang mendukung kewirausahaan telah diwujudkan melalui berbagai bentuk program, seperti pemberian akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, pelatihan kewirausahaan, serta penyediaan inkubator bisnis. Selain itu, digitalisasi UMKM menjadi salah satu langkah penting dalam menjawab tantangan globalisasi. Melalui program pelatihan penggunaan teknologi informasi dan e-commerce, pelaku UMKM kini mampu menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional. Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi prioritas utama pemerintah. Pelaku UMKM perlu memiliki kemampuan manajerial, teknis, dan strategis dalam mengelola bisnis agar mampu bertahan dan berkembang. Program pelatihan, pendampingan usaha, serta penguatan literasi digital dan keuangan menjadi komponen penting yang mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah terbukti memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan daya saing UMKM dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya turut berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Untuk memaksimalkan dampak dari kebijakan yang telah diterapkan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

1. Pemerataan Program

Pemerintah harus memastikan bahwa program-program pendukung UMKM menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Ketimpangan akses terhadap pelatihan

dan pembiayaan masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

2. Penguatan Kemitraan

Strategis Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem UMKM yang solid dan terintegrasi.

3. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Diperlukan sistem evaluasi yang sistematis terhadap efektivitas program yang dijalankan. Data dan feedback dari pelaku UMKM harus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

4. Inovasi Berbasis Teknologi

Pemerintah perlu mendorong pelaku UMKM untuk terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai alat utama dalam efisiensi operasional dan pemasaran produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, A., & Sobari, I. S. (2020). Membangun Jiwa Kewirausahaan Di Era Milenial Bagi Mahasiswa Institut Stiami Kampus Tangerang Selatan. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 140–144
- Bellani Syahputri Siregar, Tomi Jaffisa. Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Desa Laut Dendang. *Jurnal Publik Reform UND HAR MEDAN*. Edisi 7. 2020
- Devi Chandra Nirwana , Muhammadijah ,Muhajirah Hasanuddin. Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*, April 2017 Volume 3 Nomor 1

- Mala, E. (2017). Peran Pemerintah dalam Penguatan dan Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 132–148.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugrogo, R., & Wulandari, R. (2021). Strategi Pengembangan UMKM dan Kebijakan Ekonomi: Fokus pada Layanan Keuangan dan Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 18(3), 234--250.
- H Riofita - Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015
- Riofita, Hendra, Strategi Pemasaran, (Pekan Baru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015) h.115
- Riofita Hendra & Nopiyanti. (2018). The Influence Of Student's Comprehension On Marketing Mix Towards Their Purchase Decision. *Jurnal Econosains*, 16 (2), 117-123.
- Riofita Hendra, (2018). Analisis Pelayanan Prima dan Kualitas Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau, vol 2, no 1.
- Renaldi,Hendra Riofita. Pengaruh Penggunaan E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomiuniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*Vol 8, No. 5 Mei2024
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan Kombinasi (Mixed Methods)*.Bandung: Alfabeta.
- Yusnita, M., & Wahyudin, N. (2019). Strategi Peningkatan Keunggulan Kompetitif Umkm Melalui Kapasitas Inovasi Dengan Perspektif Gender. *Econbank Journal of Economics and Banking*, 1(2), 174–183.